

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Gunung Sindur merupakan salah satu kecamatan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2018, Kecamatan Gunung Sindur memiliki luas wilayah 48,81 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 102.998 jiwa. Kecamatan Gunung Sindur terdiri dari 10 desa yaitu Jampang, Cibadung, Cibinong, Cidokom, Padurenan, Curug, Rawakalong, Pabuaran, Pengasinan dan Gunung Sindur.

Sebelah timur kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bojong Sari Depok, sebelah utara berbatasan dengan Serpong dan Kecamatan Setu Tangerang Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Gunung Sindur salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang dikonsentrasikan pada industri perdesaan dan pengembangan UMKM, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan. Sehingga komoditas unggulan utama Kecamatan Gunung Sindur dari pertanian dan perikanan.

4.1.2 Kondisi Sosial

Hasil riset The Islah Center (TIC) yang dipublikasikan pada tanggal 3 oktober 2016 mengungkapkan penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat di urutan pertama provinsi yang paling intoleran. Tingginya angka intoleransi di Jawa Barat menjadi kontradiktif dengan kultur dan budaya masyarakat Sunda sebagai 90 persen suku yang tinggal di Jabar. Dimana etnis Sunda terkenal sebagai masyarakat yang toleran, optimistis, periang, sopan, dan bersahaja.

Sejumlah lembaga seperti Setara Institute pada 2015 lalu juga menempatkan Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yakni sebanyak 44 kasus. Wahid Foundation juga menyebutkan hal yang sama. Selama 2015, lembaga itu menyebutkan kurang lebih 46 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi di Jabar.

Selain kedua lembaga itu, hasil monitoring dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sepanjang 2005 hingga 2011 juga mengatakan, terdapat 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi di Jawa Barat. Riset lain juga menyebutkan, sejak Januari 2013 hingga Januari 2014 terdapat kurang lebih 76 peristiwa intoleransi di beberapa daerah Jawa Barat seperti, Depok, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya dan Bogor.

Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terdekat dengan kota Bogor tidak disebut sebagai bagian dari wilayah intoleransi. Penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta mengungkapkan beberapa kasus intoleransi yang terjadi di wilayah Jawa Barat tidak menjadikan seluruh Jawa Barat sebagai daerah intoleransi. Penelitian berjudul “Studi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama: Toleransi antar Umat Beragama pada Masyarakat Heterogen di Jawa Barat” mencoba mempertanyakan hasil studi yang dilakukan lembaga advokasi yang merujuk wilayah Jabar sebagai daerah intoleransi dan tidak rukun. Studi tersebut menyebutkan kerja sama antar warga, kerukunan beragama, jauh lebih banyak dibandingkan ketika ribut karena persoalan tertentu. Jadi, kondisi keberagaman di Jawa Barat lebih banyak sejarah damainya dibandingkan dengan konfliknya.

Studi tersebut mengungkapkan data ada enam daerah yang dapat menjaga kerukunan antar umat beragama secara alami, asli, turun temurun atas nama keberagaman. Keenam wilayah di Jawa Barat itu yakni Kampung Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kota Depok. Desa Kertajaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi. Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten

Kuningan, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Cimahi, Kampung Sawah, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Di daerah yang diteliti tidak ada warga yang ribut karena persoalan agama. Kalaupun ada keributan antar kekerabatan terjadi karena urusan lain, kemungkinan urusan ekonomi.

Menurut tim peneliti, modal sosial atau ikatan antar warga menjadi faktor penting dalam memelihara kedamaian antar suku maupun antar warga di beberapa wilayah sadar kerukunan tersebut. Sebagai contoh di Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Gunung Sindur hidup rukun dikarenakan oleh ikatan kekerabatan yang sudah terbentuk sangat kuat tanpa ada pabrikan atau pelabelan dari lembaga tertentu maupun pemerintah.

Temuan inilah yang memperkuat alasan penelitian di Kecamatan Gunung Sindur. Meskipun secara umum tidak semua desa di Gunung Sindur mendapatkan predikat serupa, tapi setidaknya bisa dijadikan tolak ukur karena berada di wilayah yang sama yaitu Kecamatan gunung sindur. Bila dibandingkan dengan tiga Kecamatan terdekatnya dalam satu Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Parung, Ciseeng dan Rumpin, Kecamatan Gunung Sindur merupakan kecamatan yang sarat dengan keberagaman, misalnya dilihat dari keberadaan rumah ibadah. Gereja berjumlah 12, vihara jumlahnya 5, dan masjid sendiri sebanyak 93 ditambah langgar sekitar 239.

Tabel 4.1

Perbandingan jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Bogor

No.	Kecamatan	Rumah Ibadah		
		Masjid	Gereja	Vihara
1	Gunung Sindur	93	12	5
2	Parung	(tidak ada data)	(tidak ada data)	4
3	Rumpin	159	-	1
4	Ciseeng	76	2	0

Sumber data: BPS Kabupaten Bogor 2018

Tetapi kerukunan yang terjalin di era digitalisasi saat ini sangat rentan, sehingga perlu dipelihara. Ini terbukti pada Selasa tanggal 5 Desember 2017 pukul 16.17 WIB, Kapolres Bogor AKBP Andi Moch. Dicky dan Ketua MUI Kabupaten Bogor Mukri Aji mengeluarkan rilis permasalahan Penistaan Agama yang dilakukan oleh pelaku berinisial DNP (32) yang berdomisili di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor terkait dengan cuitannya di sosial media. Kasus tersebut kontradiktif dengan keberagaman yang ada di Kecamatan Gunung Sindur tapi salah seorang warganya melakukan penghinaan terhadap salah satu agama. Meski demikian, terkait kasus ini bukan menjadi ranah pembahasan penelitian ini.

4.1.3 Kondisi Politik

Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Gunung Sindur tergolong tinggi. Dimana setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa bukan lurah, untuk memilih seorang kepala desa harus masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Lain halnya jika dipimpin oleh lurah yang dipilih berdasarkan mandat. Berarti warga sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas politik di wilayahnya. Sehingga tidak heran jika preferensi politik masyarakat juga cukup tinggi. Di antara desa lainnya partisipasi di Desa Cibinong terhadap aktivitas politik lebih tinggi. Di Cibinong terdapat sembilan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) parpol, dan di Desa Gunung Sindur 10 parpol, sedangkan di desa lainnya angkanya lebih rendah, bahkan ada yang di angka nol. Terbukti dengan banyaknya kegiatan aktivitas politik Anggota DPR RI ke wilayah Gunung Sindur termasuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang dalam satu wilayah bisa terjadi tumpang tindih antara kegiatan antar anggota DPR RI.

Dalam skala nasional, aktivitas politik di Kabupaten Bogor lebih bergejolak. Kabupaten Bogor dikenal sebagai “dapil neraka”, julukan untuk daerah yang tingkat persaingan politiknya cukup tinggi dalam setiap pemilu legislatif. Tokoh-tokoh politik yang bersaing dan terpilih di dapil ini memiliki nama besar dan cukup populer di masyarakat seperti Fadli Zon dari Partai Gerindra, Adrian Napitupulu dari PDIP, Airlangga Hartanto (sebelum menjadi Menteri Perdagangan) dari Partai Golkar, dan Primus Yustisio dari Fraksi PAN.

Para anggota dewan tersebut rata-rata memiliki massa yang loyal karena mereka sudah berkali-kali terpilih dalam pileg. Maka untuk beberapa alasan tersebut, penelitian ini memilih Kecamatan Gunung Sindur karena dianggap cukup merepresentasikan Kabupaten Bogor. Pertimbangan lain, lokasi Kecamatan Gunung Sindur juga lebih dekat dengan ibukota sehingga memudahkan proses penelitian.

4.1 Dasar Hukum Sosialisasi Empat Pilar

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar Berdasarkan buku Laporan Kinerja MPR RI Tahun 2018-2019, pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR mempunyai tugas sebagai berikut: Memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika; Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan.

Sebagai salah satu amanat undang-undang di atas yaitu pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI seperti disebutkan di atas, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi sosialisasi, sehingga akan terwujud masyarakat yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, memahami aturan konstitusi, dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta memahami arti kebhinnekaan yang dapat menjadi kekuatan dan perekat dalam mempersatukan bangsa dan negara sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional.

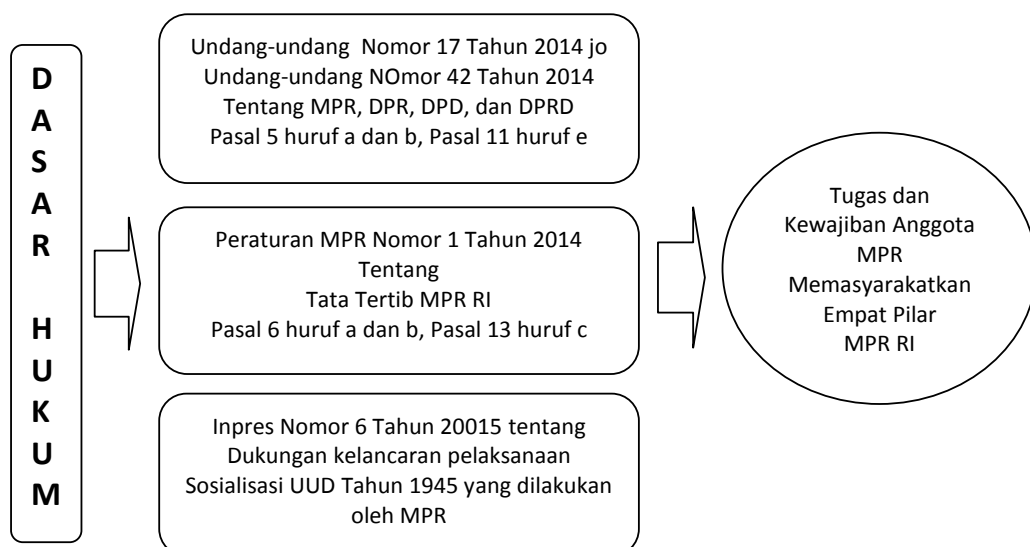
Selain itu, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis, sejahtera, dan bermartabat sesuai amanah konstitusi. Pelaksanaan sosialisasi UUD 1945 dan Ketetapan MPR sudah dilaksanakan sejak adanya perubahan UUD 1945 melalui Sosialisasi Putusan MPR dan Pimpinan MPR periode 1999-2004 dengan membentuk Badan Pekerja yang keanggotaannya mencapai 70 orang anggota.

Kemudian dilanjutkan oleh pimpinan MPR periode 2009-2014 dengan membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang merupakan alat kelengkapan Pimpinan MPR RI dengan keanggotaan berjumlah 35 orang. Tim ini bertugas menyosialisasikan UUD 1945, namun atas kesepakatan bersama Pimpinan MPR dan anggota MPR berkembang menjadi mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal dengan nama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Singkatnya, dasar hukum pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Dasar Hukum Sosialisasi Empat Pilar



Tahun 2014, MPR membentuk Badan Sosialisasi dengan jumlah anggota 45 orang, yang terdiri atas unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR. Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR Pasal 48, Badan Sosialisasi mempunyai tugas untuk: memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara menyeluruh; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Mengutip dari buku “Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI”, tugas Badan Sosialisasi MPR RI melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kelompok sasaran dengan berbagai metode, baik secara langsung maupun media massa. Beberapa kegiatan sosialisasi ditujukan langsung kepada penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah; kelompok-kelompok masyarakat; pelatihan untuk pelatih; lomba-lomba; cerdas cermat; dialog interaktif melalui media elektronik; sosialisasi melalui media cetak; serta seminar *dan focus group discussion*.

Perlunya pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar karena muncul banyak ancaman yang serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2014:6), ada dua faktor yang harus diantisipasi menurut TAP MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

1. Faktor dari dalam negeri:

- a. Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit serta tidak harmonisnya pola interaksi antar umat beragama. Misalnya dengan munculnya aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, hal ini harus diantisipasi agar tidak ada lagi masyarakat yang turut serta dalam gerakan ini.
- b. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme

kedaerahan. Fanatisme kedaerahan ini membahayakan karena akan mendorong munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah.

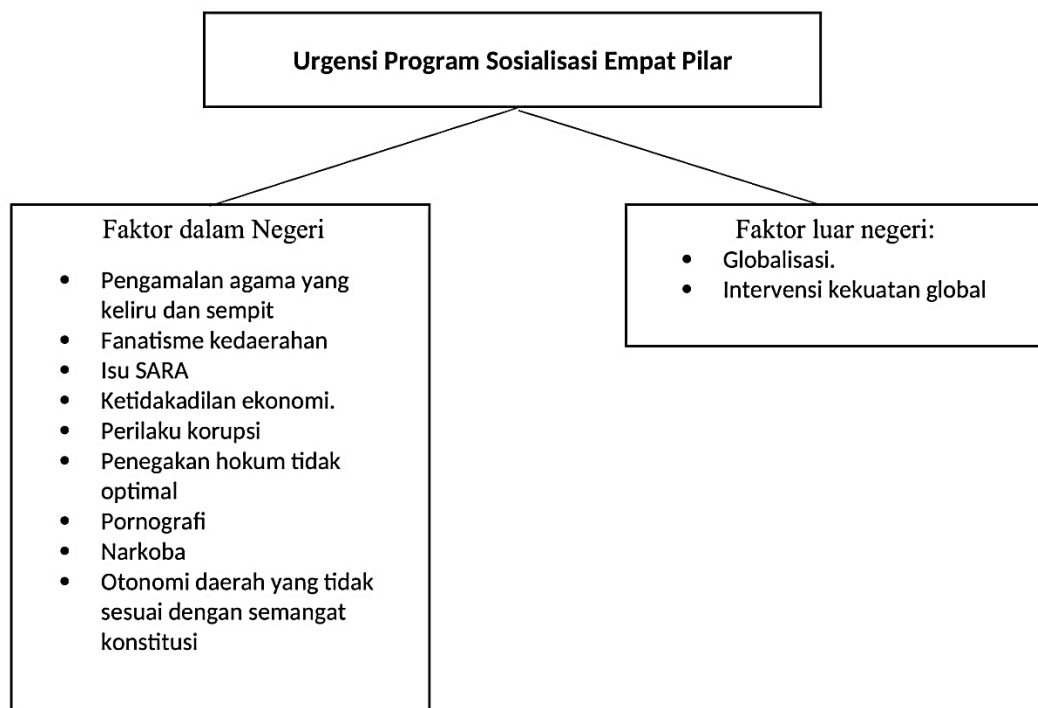
- c. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan. Kondisi seperti ini semakin nampak dengan mencuatnya isu SARA yang tidak sedikit. Contohnya, saat pemilihan Pilkada DKI lalu, isu SARA yang berhembus sangat kencang.
- d. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
- e. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pimpinan dan tokoh bangsa. Perilaku korupsi yang sangat kronis membuat bangsa ini menjadi keropos.
- f. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optima, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat. Ada istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Beginilah hukum bekerja saat ini.
- g. Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif budaya luar
- h. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran dan penyeludupan obat-obat terlarang;
- i. Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi.

2. Faktor luar negeri:

- a. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. Pengaruh gadget dan arus informasi yang berseliweran setiap harinya, memungkinkan dunia tanpa sekat. Sehingga masyarakat perlu waspada ada pengikisan jati diri bangsa melalui masuknya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia.

- b. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Kapitalisme global yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada kebijakan-kebijakan politik di Indonesia.

Tabel 4.3
Urgensi Empat Pilar MPR RI



Adapun tata laksana Sosialisasi Empat Pilar dari mulai pengajuan hingga laporan sebagai berikut:

1. Setiap anggota akan mendapatkan surat edaran terkait pelaksanaan kegiatan Empat Pilar dari Setjen MPR. Surat tersebut mencantumkan ketentuan waktu pelaksanaan, aturan kegiatan, dan pendanaan kegiatan.
2. Anggota mengajukan permohonan kegiatan berdasarkan masa waktu yang telah ditentukan. Tanggal pelaksanaan harus menyesuaikan dengan agenda sosialisasi Setjen MPR RI, agar kegiatan tidak dilaksanakan bersamaan. Surat pengajuan memuat rencana jadwal pelaksanaan, tempat kegiatan, dan alamat pengiriman bahan atau materi, serta diajukan paling lambat tujuh

hari sebelum pelaksanaan kegiatan ke Sekretaris Jenderal MPR dengan tembusan kepada pimpinan pimpinan fraksi.

3. Bahan atau materi kegiatan sosialisasi berupa buku dan sertifikat sebanyak 150 set dan pengiriman materi akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI.
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan menjadi tanggung jawab anggota DPR bersangkutan.
5. Seluruh kegiatan sosialisasi oleh anggota DPR di daerah pemilihan, disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada MPR. Laporan tersebut menjelaskan tempat pelaksanaan, waktu, narasumber anggota MPR, jumlah peserta, pertanyaan, masukan dan saran dari peserta. Serta dokumen kegiatan, dan *fotocopy* publikasi media cetak atau *online* yang mempublikasikan kegiatan tersebut.
6. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban keuangan paling lambat tujuh hari setelah kegiatan dilaksanakan.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gunung Sindur yang dilakukan antara kurun waktu tahun 2014-2019. Sebagian besar data diperoleh dari wawancara informan yang mengikuti kegiatan sosialisasi di tempat dan tahun yang berbeda. Didukung dengan dokumen dan buku yang diterbitkan oleh MPR RI yang memuat soal Sosialisasi Empat Pilar. Sebagai pelengkap, dilakukan observasi terhadap kegiatan Empat Pilar Anggota DPR RI Primus Yustisio di Jalan Beringin Kampung Pakis RT 01 RW 04 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur pada April 2019.

Sembilan informan dipilih untuk pemenuhan data penelitian yaitu lima orang warga Kecamatan Gunung Sindur, satu orang panitia penyelenggara, dua narasumber Anggota DPR RI, dan satu narasumber dari Setjen MPR RI. Jadwal wawancara disesuaikan dengan agenda masing-masing narasumber. Berikut data singkat para informan :

Tabel 4.4
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Usia	Jabatan	Tempat dan Tanggal Wawancara
1.	Haikal	H	20	Warga	Gunung Sindur, 26 Januari 2020
2.	Muhammad Arif	MA	25	Warga	Gunung Sindur, 26 Januari 2020
3.	Henry Wijaya	HW	34	Staff Desa	Gunung Sindur, 26 Januari 2020
4.	Luthfiana	L	17	Siswi	Gunung Sindur, 26 Januari 2020
5.	Dori Hidayat	DH	41	Guru	Gunung Sindur, 26 Januari 2020
6.	Suwardi	S	38	Panitia penyelenggara	Ciputat, 9 Februari 2020
7.	Tb.Soenmandjaja	SA	63	Anggota DPR RI Fraksi PKS	Kemang Bogor, 31 Januari 2020
8.	Primus Yustisio	PY	45	Anggota DPR RI Fraksi PAN	Bintaro, 29 Juli 2020
9.	Usep Supriatna	US	55	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Setjen MPR RI	Senayan, 30 Januari 2020

Setelah mereduksi data yang diperlukan, hasil penelitian diklasifikasikan ke dalam enam kriteria evaluasi William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

4.3.1 Efektifitas

Seperti diulas dalam bab sebelumnya, efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat beYang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429).

Efektifitas berpedoman pada pertanyaan apakah program Sosialisasi Empat Pilar sesuai dengan yang diharapkan, atau tercapaikah tujuan dari kegiatan tersebut, ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Harapan dan tujuan kegiatan paling mendasar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar adalah memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi sosialisasi yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Sangat efektif, bisa tahu Empat Pilar dan kondisi negara. Tidak seperti halnya kegiatan Empat Pilar yang diadakan jika dengan pendekatan hiburan misalnya seperti wayang golek. Karena ada sesi tanya jawab dan formalnya kegiatan membuat kami juga dituntut lebih serius dalam menyimak.” (wawancara dengan H pada 26 Januari 2020)

Pendapat tersebut dikuatkan oleh informan kedua bahwa kegiatan Sosialisasi Empat Pilar cukup efektif mengenalkan materi-materi Empat Pilar. Meskipun kegiatan tersebut diikutinya pada tahun 2018, tapi dia masih mengingat materi yang disampaikan. Selain karena kegiatan yang bersifat dialogis, para informan mengakui efektifitas terjadi karena ada peran anggota DPR sebagai narasumber atau penerjemah. Informan ketiga yang juga bekerja sebagai staff di Desa Rawakalong menilai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang diikutinya cukup efektif karena peserta sosialisasi di Kantor Desa Rawakalong pada tahun 2017 adalah perangkat RT dan RW. Diundangnya para perangkat RT dan RW sebagai peserta karena mereka dianggap memiliki peran strategis di masyarakat. Meskipun pada realisasinya, informan ketiga tidak bisa memastikan kalau yang bersangkutan akan meneruskan atau tidak informasi tentang materi Empat Pilar pada lingkungan sekitarnya.

“Kegiatan efektif. Efektif, karena materi disampaikan oleh anggota dewan juga penerjemah tambahan. Program ini menambah wawasan tentang Empat Pilar. Kegiatan terlaksana ada silaturahmi antara anggota dewan dan masyarakat, materi dijelaskan dengan baik. Diikuti oleh RT dan RW tapi tidak tahu apakah mereka meneruskan atau tidak”. (wawancara dengan MA pada 26 Januari 2020)

Sayangnya, menurut informan ketiga, penyampaian materi oleh narasumber saat itu kurang bisa dipahami. Sebagai informasi, anggota DPR tersebut dari Fraksi Nasdem Bachtiar Aly yang berasal dari Aceh. Menurut para peserta penyampaian materi oleh narasumber secara dialek dan bahasa ada yang kurang dipahami warga. Kritik juga datang dari informan kelima untuk Sosialisasi Empat Pilar yang diadakan oleh TB. Soenmandjaja dari Fraksi PKS di SMA Nurul Falah pada tahun 2018, karena acara dilaksanakan malam hari. Hal itu mengurangi kondusifitas acara dan salah satu yang menyebabkan minimnya jumlah peserta.

“Untuk siswa lumayan efektif karena ada materi-materi tentang Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sayang jadwal pelaksanaan malam hari setelah shalat isya, rasanya kurang efektif untuk sebuah acara seminar. Pesertanya ada siswa dan warga sekitar,” (wawancara dengan DH pada 26 Januari 2020)

Informan keenam sebagai panitia inti Sosialisasi Empat Pilar Anggota DPR RI Primus Yustisio sepakat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sangat efektif untuk menambah wawasan masyarakat tentang nilai-nilai dalam Empat Pilar. Berdasarkan pengamatannya, dari awal kegiatan saat seluruh peserta harus menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, seolah membangkitkan kembali rasa nasionalisme terutama untuk mereka yang sudah lama tidak bersentuhan dengan materi-materi kenegaraan.

“Ada sebagian yang tidak tahu tentang Empat Pilar. Bahkan banyak masyarakat tidak hapal lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI. Paling tidak ada rasa tumbuh kembang rasa cinta kembali pada negara. Dengan menyanyikan lagu ada yang bergetar di hati. Terlihat dari ekspresi para peserta.” (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Efektifitas Sosialisasi Empat Pilar di mata informan ketujuh tidak terdeteksi untuk para peserta. Bahkan untuk mengenai efektifitas kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kalau untuk peserta efektifitasnya tidak terukur.

“Tidak terdeteksi sejauh mana peserta menerima materi sosialisasi. Sebagai anggota badan pengkajian, laporan mengenai kegiatan efektif atau tidak ada di sana. Ini kan bukan badan pengkajian atau badan sosialisasi yang membahas ada atau tidak adanya dampak sosialisasi. Efektifitas untuk peserta tidak terukur. Bisa dilihat dari eksles letupan di masyarakat yang sulit terukur,” (wawancara dengan SA pada Februari 2020)

Informan kedelapan menilai, 90 persen peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakannya belum memahami nilai-nilai Empat Pilar sepenuhnya. Apalagi, para peserta tampaknya tidak terlalu fokus pada materi yang disampaikan. Terlihat dari pertanyaan para peserta lebih banyak tentang kehidupan pribadi informan kedelapan yang notabene seorang publik figur.

“Soal efektifitas, saya tidak tahu dengan anggota dewan lain di dapil karena pendekatan berbeda. Pengalaman saya, masyarakat kurang minat dengan pertanyaan politik karena mungkin dimana-mana sudah banyak berita politik, mereka juga sudah tahu tentang Pancasila, NKRI harga mati tidak perlu diperbincangkan lagi. Tapi saya yakin 90 persen tidak paham dengan nilai-nilai. Itulah tugas kita. Masalahnya, sebagai narasumber masyarakat kurang tertarik pada pertanyaan seputar Empat Pilar. Mereka lebih tertarik bertanya soal istri, anak dan soal keluarga. Strategi ini yang harus saya ubah agar masyarakat lebih fokus. Saya datang di bagian kesimpulan dan sebelumnya narasumber yang menyampaikan materi.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Sebaliknya, ujar informan kedelapan, bagi anggota DPR kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di dapil efektif dari sisi politik karena memberikan kesempatan pada Anggota DPR untuk bertemu langsung dengan konstituennya di samping reses. Anggota DPR juga memiliki hak untuk memilih konstituen mana yang akan dilibatkan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar.

“Ini (Empat Pilar) salah satu program yang dibuat konsensus bersama melahirkan produk untuk mengedukasi konstitusi dasar negara dan nilai-nilai Pancasila. Tapi di sisi lain pendekatan langsung tidak lupa pada kewajiban menanamkan sesuatu tujuan politis. Secara jabatan menggugurkan kewajiban.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Informan kesembilan dari Setjen MPR RI menyatakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ibarat pengganti Program Pedoman Penghayatan dan Penanaman Nilai Pancasila (P4) yang sudah tidak ada. Sehingga kegiatan ini dinilai sangat efektif untuk menggugah kesadaran bernegara. Adapun secara angka, MPR sudah melakukan survey tentang efektifitas kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yaitu “Survei Nasional Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI”, untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan Empat Pilar. Survei

tersebut bekerja sama dengan Center the Study of Religion and Culture (CSRC), Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Efektif atau tidaknya, MPR bersama perguruan tinggi sudah melakukan survei. Bagaimana tingkat pemahaman anggota, tingkat antusiasme masyarakat. Secara pribadi kegiatan ini sangat efektif. Kita kehilangan P4. Efeknya kesadaran masyarakat berbangsa hilang. Dengan adanya Empat Pilar kembali menggugah masyarakat punya kontribusi negara kemajemukan negara kita bisa bersatu. Bangsa ini memiliki kontitusi negara, melalui Empat Pilar MPR RI diingatkan ada kebhinekaan. Sangat efektif sekali.” (wawancara dengan U pada Februari 2020).

Berdasarkan observasi pada saat Sosialisasi Empat Pilar di Kampung Pakis Desa Rawakalong mayoritas warga yang hadir tampaknya sudah mengetahui tentang apa itu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, karena mereka antusias menjawab saat narasumber menjelaskan tentang empat hal tersebut. Hanya saja banyak yang tidak tahu ada istilah Empat Pilar. Para peserta cukup tertib saat penyampaian narasumber menyampaikan materi. Meskipun saat itu, peserta yang hadir cukup banyak, dan saat konfirmasi pada panitia, peserta melebihi kuota yang seharusnya hanya 150 orang. Antusiasme peserta juga karena informan kedelapan hadir bersama istrinya yang juga seorang publik figur. Sebagai informasi kegiatan yang diobservasi bersamaan dengan masa kampanye Pileg 2019. Soal kondusifitas ini tidak diketahui bagaimana kondisinya jika kegiatan di dalam ruangan, apakah lebih kondusif atau tidak jika dibandingkan dengan kegiatan di luar ruangan.

Mengutip data dari buku Laporan Kinerja tahunan MPR RI tahun 2018, survei tersebut menjabarkan sekitar 32,8% atau sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia (data BPS 2018 jumlah penduduk 265 juta jiwa) mengetahui bahwa MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar, minimal pernah mendengarnya. Tren pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dari dari tahun ke tahun pun cenderung positif. Tahun 2011 pengetahuan masyarakat menyentuh 23%, sementara tahun 2018, 32,8%. Jika dihitung selisih ada penambahan sekitar 24 juta orang yang terpapar program Sosialisasi Empat Pilar dalam rentang waktu tujuh tahun.

Data dari MPR menyebutkan, dari beragam metode, berdasarkan popularitas Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan menempati posisi ketiga dengan persentase 16,3% dengan keterlibatan sebanyak 28,6%. Popularitas tertinggi yaitu

televisi sebanyak 24%, metode seminar memiliki prosentasi paling tinggi kedua yaitu 20,6 persen, dimana 28,7 persennya mengaku terlibat dalam kegiatan seminar. Selanjutnya persentase sosialisasi oleh pimpinan MPR sebanyak 15,2%, lomba cerdas cermat untuk siswa SLTA 14,6%, Sosialisasi di media cetak 14,1 %, sosialisasi oleh badan MPR 13,4 %, pertunjukan seni budaya 11,4%, dan debat konstitusi tingkat SLTA dan perguruan tinggi 10,5%.

Soal pemahaman materi, menurut survei sebanyak 70,3% menyatakan materi Sosialisasi Empat Pilar mudah dipahami, bahkan 7,2% diantaranya menganggap sangat mudah. Sisanya sebanyak 29,7 % menolak anggapan bahwa materi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Tren menunjukkan pemahaman seseorang tentang materi Sosialisasi Empat Pilar berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.

4.3.2 Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) mengukur kepatutan biaya yang dikeluarkan dengan efektifitas kegiatan. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata 75 persen sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dokumen MPR RI merinci biaya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam satu kali kegiatan yaitu Rp 37.704.927 setelah dipotong pajak. Anggaran tersebut untuk honor narasumber, honorarium moderator, honorarium panitia teknis, konsumsi untuk 160 orang (150 orang peserta dan panitia), bantuan tempat pelaksanaan, bantuan untuk publikasi kegiatan, pencetakan undangan, dan transport peserta. Melihat jumlah anggaran tersebut apakah sudah mencapai efisiensi anggaran? Sudah optimalkah penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut?

Informan ketujuh mengatakan anggaran untuk sosialisasi ditentukan oleh negara. Anggota DPR tidak ikut andil dalam penentuan anggaran namun DPR memiliki badan sendiri dalam menentukan anggaran. Sehingga dia tidak bisa menentukan apakah anggaran tersebut sudah sesuai atau tidak.

“Penentuan anggaran satu kali satu sosialisasi berasal dari uang negara. Tapi ada pajak-pajak yang dipotong, berarti buat peserta agar tidak kurang ada uang dari honor saya sebesar 3,8 juta yang diberikan. Jumlah peserta 150 orang, transport 100 ribu uang makan 50 ribu, fasilitas tempat . Sudah ada di MPR sebelumnya di komisi III sebagai mitra kerja MPR, honor pemateri juga ada. Berkaitan penganggaran tiap tahun tentatif dari pemerintah, besaran tidak paham, besaran keseluruhan. Anggaran untuk kesekretarian dan untuk anggota dari majelis. Dari badan-badan inilah rapat-rapat kegiatan pembahasan nominal di badan penganggaran. Kegiatan ini memerlukan biaya berapa badan sosialisasi. Penganggaran sudah dapat pagu. Bagaimana uang sekian membagi untuk kegiatan.” (wawancara dengan SA pada Februari 2020)

Dari keterangan informan ketujuh tersebut bisa diartikan dana yang sudah dianggarkan tidak selalu mencukupi kebutuhan kegiatan. Namun Anggota DPR RI tidak bisa mengajukan keberatan nominal anggaran karena sudah ada pagu dari Badan Anggaran. Untuk itu, menurutnya sosialisasi Empat Pilar tidak harus selalu terkait dengan anggaran. Sosialisasi Empat Pilar bisa dilakukan dimana saja dengan audiens yang berbeda dan tidak terikat secara kelembagaan. Di luar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang resmi, informan ketujuh mengaku cukup sering menyampaikan materi Empat Pilar pada forum lain seperti di forum majlis ta’lim.

Mendukung pernyataan informan ketujuh, informan kesembilan mengatakan soal anggaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sudah ada pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di dapil.

“Soal efektif atau tidaknya anggaran dana bukan kewenangan saya. Bisa tanya ke anggotanya. Tapi sangat memungkinkan ada perubahan anggaran kalau anggaran tidak cukup. Di MPR ada Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian yang melakukan ini rapat-rapat kegiatan. Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian melakukan pembahasan mengenai nominal di Badan Anggaran. Untuk kegiatan ini dari Badan Sosialisasi perlu uang berapa ke Badan Anggaran. Badan Anggaran berjuang mendapatkan anggaran kegiatan. Pas atau tidaknya anggaran tersebut sudah ada pagu duluan jadi tinggal

bagaimana uang sekian digunakan untuk kegiatan ini.” (wawancara dengan US pada Februari 2020)

Informan kedelapan lebih fleksibel soal anggaran. Pihaknya akan menggunakan semaksimal mungkin dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan Empat Pilar. Penggunaan anggaran diserahkan kepada tim pendamping yang akan mengatur bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan. Mendukung pernyataan informan kedelapan, informan keenam sebagai tim kerja menyatakan pembiayaan kegiatan sudah cukup baik. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah para peserta mendapatkan makan dan minum yang cukup selama berlangsungnya kegiatan. Fasilitas yang diberikan oleh panitia yaitu ruangan yang memadai untuk sekira 150 peserta. Jika tidak ada ruangan yang representatif, kegiatan dilakukan di luar namun tetap memerhatikan kenyamanan peserta, misalnya dengan disediakan tenda dan kursi. Penggunaan layar tayang digunakan sesuai kebutuhan. Layar tayang diperlukan untuk penyampaian materi Sosialisasi Empat Pilar yang sudah disiapkan oleh Badan Sosialisasi MPR RI. Jika tidak menggunakan layar tayang, ada buku materi sebagai sumber pendamping bagi para peserta dalam membantu memahami materi yang disampaikan.

“MPR memberikan buku panduan kepada peserta juga panitia, namun dalam prosesnya, pengiriman buku itu sering terlambat. Sehingga saat pelaksanaan, kegiatan itu tidak menggunakan buku Sosialisasi Empat Pilar seperti juklak dan juknisnya. Tapi sebagian besar pakai buku materi.” (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Untuk pemberian uang *transport* untuk peserta, informan keenam mengaku menyesuaikan dengan keadaan, ada saatnya peserta mendapatkan uang *transport* ada juga yang tidak. Untuk kegiatan Empat Pilar di sekolah umumnya siswa tidak diberikan uang *transport*, tapi uang tersebut disumbangkan kepada pihak sekolah untuk membantu kebutuhan sekolah.

Soal fasilitas kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, umumnya peserta menyatakan penyediaan fasilitas dari panitia cukup baik. Panitia memberikan buku materi Empat Pilar, tas punggung bertuliskan MPR RI, nasi kotak dan makanan ringan untuk peserta.

Soal uang transport untuk peserta, mayoritas peserta mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut, atau merasa tidak berwenang untuk menjawab persoalan anggaran.

“Sangat layak. Selain ada konsumsi yang diberikan, panitia juga memberikan doorprize kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh narasumber maupun oleh MC. Uang transport peserta kurang tahu. Sepertinya ada bantuan ke sekolah dari kegiatan itu.” (wawancara dengan H Januari 2020)

Fasilitas yang dikritik oleh peserta salah satunya penggunaan layar tayang. Ketika kegiatan dilakukan di luar ruangan penggunaan layar tayang menjadi terganggu karena intensitas cahaya yang terlalu terang. Sehingga proyektor tidak terpakai untuk kegiatan di luar ruangan.

“Fasilitas menggunakan semua bahan yang diberikan seperti buku, dan lain-lain. Bahkan ada tas yang dibagikan. Hanya tidak menggunakan proyektor saja, karena kegiatan dilaksanakan di ruang terbuka yang banyak cahaya matahari. Sedikit mengganggu ke layar tayang.” (wawancara dengan HW pada Januari 2020)

Persoalan tidak adanya proyektor juga terjadi saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar informan ketujuh di SMA Nurul Falah Desa Rawakalong. Sebelumnya, informan kedelapan juga pernah mengunjungi SMA ini untuk melakukan kegiatan serupa. Awalnya, kegiatan akan dilakukan di luar ruangan, namun karena acara dilakukan pada malam hari dan cuaca tidak mendukung, kegiatan dipindah ke dalam ruangan.

“Untuk acara Pak Soenmandjaya, panitia sebenarnya sudah menyiapkan di lapangan atau tempat seperti yang disediakan terhadap Pak Primus juga. Jadwal semula, acara akan dilangsungkan bada magrib. Tapi karena cuaca, akhirnya diputuskan untuk pindah tempat. Jadi karena malam hari peserta sedikit. Di dalam ruangan, panitia tidak menyiapkan proyektor sebagai alat untuk mempresentasikan materi Empat Pilar, jadi dari buku panduan dan paparan langsung saja yang diberikan oleh panitia dan Anggota Dewan. Kalau saat Pak Primus kegiatannya *outdoor*, ada panggunnya juga ada tenda.” (wawancara dengan DH pada Januari 2020)

Terkait fasilitas yang disediakan oleh panitia, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Kampung Pakis Desa Rawakalong, lokasi acara memanfaatkan tanah lapang milik warga untuk digunakan sebagai tempat kegiatan. Saat hari pelaksanaan, sejak pagi sudah terpasang tenda, kursi-kursi untuk peserta, dan meja untuk narasumber. Tidak terlihat ada layar tayang yang digunakan narasumber dalam menyampaikan materi. Saat itu, narasumber yaitu informan kedelapan menyampaikan materi tanpa buku panduan. Namun tampak warga mendapatkan sejumlah buku saku tentang materi Empat Pilar yang sebelumnya dibagikan oleh panitia. Selama kegiatan peserta mendapatkan kudapan ringan dari panitia. Di akhir acara mereka mendapatkan nasi kotak.

4.3.3 Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Apakah sudah menjawab masalah yang ada.

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar di dapil umumnya dilakukan dalam bentuk seminar. Ada narasumber yang menyampaikan materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Apakah metode ini sudah sesuai dengan harapan, atau tepatkah metode ini diterapkan pada masyarakat di daerah pemilihan? Para informan umumnya menilai format Sosialisasi Empat Pilar di dapil sudah memenuhi harapan mereka yaitu bertatap muka langsung dengan wakil mereka di DPR RI apalagi ada kesempatan berdialog lewat forum tanya jawab. Para peserta pun diberikan kebebasan dalam mengajukan pertanyaan, tidak selalu tentang Empat Pilar namun kebijakan lain sebagai bentuk aspirasi.

Namun terkait dengan narasumber, informan ketiga merasa kurang berkenan dengan penyampaian dari narasumber yang kurang lugas karena perbedaan bahasa dan dialek.

“Saat kegiatan Bapak Bachtiar Aly dari Partai Nasdem, ada kekurangan kesulitan bahasa karena beda kultur. Cara penyampaiannya kurang lugas, mungkin karena logat bahasa Acehnya yang berbeda dengan masyarakat di Gunung Sindur. Tapi kekurangan itu mampu ditutupi oleh (mungkin) staffnya yang mendampingi, sehingga terkait apa yang dimaksud dengan Empat Pilar, bisa dijelaskan secara gamblang.” (wawancara dengan HW pada Januari 2020)

Informan kelima menanggapi dengan positif kegiatan tatap muka dengan Anggota DPR RI melalui Sosialisasi Empat Pilar. Menurutnya, Anggota DPR RI sebagai narasumber menjawab kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka.

“Anggota MPR sebagai narasumber menjawab kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka. Masyarakat senang dengan anggota dewan yang dekat dengan masyarakat karena bisa langsung menyampaikan aspirasi, bertanya langsung tentang apa yang ingin mereka sampaikan, dan harapkan dari wakilnya.” (wawancara dengan DH pada Januari 2020)

Informan keenam sebagai panitia mengatakan para peserta senang berdialog dengan wakil mereka di DPR RI. Terutama Primus Yustisio yang juga sebagai publik figur sehingga kehadirannya ditunggu oleh masyarakat.

“Kami menggunakan metode seminar karena ada dialog tanya jawab nanti bersama para peserta. Para peserta senang berdialog dengan Bapak Primus. Apalagi Bapak Primus artis jadi mereka cukup menunggu kehadiran Pak Primus. Sejak awal kedatangan mereka sudah menyambut dengan antusias.” (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Informan ketujuh mengatakan setiap metode sosialisasi sifatnya *segmented*. Sosialisasi di daerah pemilihan adalah salah satu metode yang dilakukan oleh anggota DPR. Umumnya sosialisasi di dapil dilakukan dengan seminar beda dengan Sosialisasi Empat Pilar lainnya yang memiliki konsep berbeda.

“Setiap metode sosialisasi sifatnya *segmented*. Sosialisasi di daerah pemilihan adalah salah satu metode yang dilakukan oleh anggota DPR. Format Empat Pilar itu banyak. Kebijakan MPR beragama macam bentuk sosialisasi. Ada juga program MPR yang diadakan di dapil lain. Saya pernah ikut sosialisasi

dengan Bapak Hidayat Nurwahid sebagai pimpinan MPR. Setiap metode itu segmented. Mana yang lebih efektif untuk masyarakat. Metode dengan cara dapil, dapil dianggap para anggota punya kewajiban untuk mensosialisasikan di dapilnya. Semua sama format Empat Pilar, berbagai metode, dapil, lurah camat, kegiatan khusus kalangan mahasiswa kegiatan berupa bela negara resimen mahasiswa outbond untuk mahasiswa, SLTA disebut lomba cerdas cermat dengan kemah empat pilar. Biasanya untuk para siswa yang pramuka. (wawancara dengan SA pada Februari 2020)

Ketika disinggung tentang jenis pertanyaan yang diajukan peserta, menurut informan ketujuh Sosialisasi Empat Pilar MPR RI jadi kesempatan oleh konstituen untuk menyampaikan aspirasi. Pihaknya tidak dapat membatasi pertanyaan yang bisa diajukan sebatas Empat Pilar saja, sebab banyak yang mengajukan pertanyaan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Pihaknya hanya memberi pengertian mengenai batasan kewenangan antara DPR dan pemerintah.

Informan kedelapan mengaku senang berdialog dengan warga karena bisa lebih dekat dengan konstituennya. Walaupun biasanya pertanyaan dari peserta melenceng dari topik Empat Pilar karena mereka masih melihat informan kedelapan sebagai publik figur, jadi pertanyaan yang diajukan lebih banyak tentang kehidupan pribadi, dan keluarga.

“Untuk mempertajam, lebih suka dialog lebih pada seminar tidak mau monolog kadang mereka tidak diberikan kesempatan bertanya tidak hanya sebagai anggota DPR RI, selama ini mereka juga bertanya sebagai artis bukan hanya kata saya tapi kata tim, jauh hari sebelum ini kata survey konsultan politik. Belajar dari situ, saya belajar mendengar lebih baik dari mereka, banyak yang ingin ditanyakan walaupun di luar Empat Pilar selama saya bisa jawab akan jawab dan mereka senang kalau saya jawab walau dalam kondisi bercanda. Cuma umumnya kritis mau mendalami Empat Pilar, nilai-nilai yang ada di empat pilar, nilai-nilai kehidupan sehari-hari seperti baru sadar. Cuma kebanyakan di dapil sering tim mengundang peserta yang sudah terlalu lama mengurus anak-anak keluarga putus sekolah sehingga kesadaran akan empat pilar kurang, waktu sekolah dulu masuk kiri keluar kanan bukan cuek atau acuh, tapi harus berulang-ulang.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Untuk itu, agar masyarakat fokus terhadap materi Empat Pilar informan kedelapan punya strategi khusus dengan menggunakan tim pendamping. Tim ini menyiapkan pemateri di awal acara untuk memberikan materi-materi Empat Pilar. Informan kedelapan akan datang pada segmen terakhir untuk menyampaikan kesimpulan, dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dengan warga sambil berdialog.

Informan kesembilan mengatakan setiap anggota dewan diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam melakukan Sosialisasi Empat Pilar tidak hanya sebatas seminar, bisa juga metode lain yang melibatkan unsur kesenian. Hal tersebut sesuai dengan metode Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR RI. Berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja MPR RI menyebutkan Empat Pilar disosialisasikan dengan berbagai cara, berikut metode Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR RI:

1. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Sosialisasi Empat Pilar kepada tokoh masyarakat dilakukan dengan menugaskan kelompok-kelompok khusus.
2. Pelatihan untuk pelatih (training of trainers) . Pelatihan training of trainer atau TOT merupakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang menyoar pada tenaga pendidik dari berbagai unsur seperti dosen dari kopertis dan non kopertis, perwira menengah dari kalangan TNI dan Polri, dan organisasi kepemudaan. Peserta-peserta tersebut diharapkan bisa menjadi narasumber dalam mendukung tugas dan kewajiban MPR dalam mensosialisasikan Empat Pilar.
3. Sosialisasi untuk memenuhi undangan/permintaan instansi/ormas.. Sosialisasi ini bersifat bottom up, dimana instansi/ormas mengajukan kepada Pimpinan PR dan Badan Sosialisasi MPR untuk melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar.
4. Sosialisasi PGRI di kabupaten/kota. Pelaksana sosialisasi ini adalah anggota Badan Sosialisasi MPR sebagai Alat Kelengkapan MPR berjumlah 45 orang yang terbagi ke dalam 7 kelompok pelaksana. Kelompok sasaran sosialisasi adalah para guru dan organisasi kemasyarakatan mengingat guru memiliki posisi strategis untuk kembali menyampaikan tentang Empat Pilar kebangsaan pada anak didik dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
5. Sosialisasi kepada mahasiswa dengan metode *outbond*. Metode ini sangat diminati oleh mahasiswa karena setelah mendapat pembekalan materi, mahasiswa langsung bertemu narasumber dan merealisasikan komponen materi melalui permainan *outbond*.

6. Sosialisasi oleh pimpinan MPR RI dan Pimpinan Badan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Pimpinan MPR dan Pimpinan Badan-badan MPR (Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Penganggaran) di berbagai daerah dengan berbagai kelompok sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat kepada Pimpinan MPR dan Badan-badan MPR RI.
7. Sosialisasi kepada aparatur pemerintah kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan pada aparatur pemerintah di daerah sebagai aparatur birokrasi yang dituntut memberikan pelayanan terbaik terutama dalam melaksanakan pelayanan demokrasi dan pelaksanaan kebijakan publik. Penyelenggara sosialisasi pimpinan dan anggota badan anggaran dan pimpinan Badan Sosialisasi melalui sekjen MPR dengan pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggara.
8. Sosialisasi melalui kemah 4 pilar. Dengan kegiatan ini, diharapkan akan terwujud sumber daya manusia yang memahami nilai luhur bangsa dan memiliki kreatifitas dalam membangun bangsa
9. Sosialisasi dengan metode lomba (lomba cerdas cermat tingkat nasional). Badan Sosialisasi MPR berupaya merancang metode sosialisasi yang bisa melibatkan semua lapisan masyarakat. Salah satunya dengan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat SLTA se-Indonesia. Metode ini diharapkan dapat membuka wawasan para siswa SMA lebih dalam lagi soal Empat Pilar Kebangsaan. Pelaksanaan lomba diawali dengan seleksi peserta di tingkat provinsi, untuk kemudian maju mewakili provinsi di putaran final di Jakarta. Setiap seleksi melibatkan 9 sekolah dengan masing-masing sekolah berjumlah 10 peserta sehingga total peserta seleksi berjumlah 2.880 peserta.
10. Sosialisasi Pendidikan Kebangsaan/bela negara. MPR memandang perlu untuk dapat memberikan pemahaman dan implementasi dari pentingnya nilai-nilai pertahanan negara oleh generasi muda di masa yang akan datang melalui sosialisasi pendidikan kebangsaan/bela negara kepada anggota resimen mahasiswa se-Indonesia.

11. Sosialisasi kepada masyarakat tertentu. Sosialisasi kepada masyarakat tertentu ditujukan pada warga Indonesia yang berada di luar negeri. Pelaksanaannya bekerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia di negara penyelenggara.
12. Sosialisasi melalui seni budaya. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar melalui seni budaya merupakan program kehumasan MPR RI dalam rangka merawat seni budaya sebagai pelaksanaan Empat Pilar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui budaya seni daerah yang dapat jadi media penyampai pesan untuk memasyarakatkan Empat Pilar. Antara lain dilaksanakan melalui gelaran budaya seni wayang kulit, wayang golek, tari-tarian dan seni lainnya.
13. Sosialisasi melalui media massa cetak dan elektronik. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik dibagi menjadi tiga cara yaitu dengan rubrikasi/advertorial media cetak, rubrikasi/advertorial media online, dan berita foto media cetak.

Pengamatan penulis dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Kampung Pakis Desa Rawakalong, Primus Yustisio menyampaikan materi sekitar 1-1,5 jam dimana 35 persen materi yang disampaikan seputar isu-isu terkini dan kehidupan pribadi. Selanjutnya sekitar setengah jam ada sesi tanya jawab, yang disambut para peserta dengan antusias. Pertanyaan yang muncul tidak hanya seputar materi Empat Pilar tapi juga banyak tentang kehidupan pribadi. Primus juga menyambut baik pertanyaan-pertanyaan meski menyangkut pertanyaan pribadi.

4.3.4 Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Perataan erat kaitannya dengan keadilan dalam pendistribusian.

Dalam hal ini pendistribusian kegiatan Empat Pilar pada warga di daerah pemilihan. Apakah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan Empat Pilar MPR RI? Untuk menjawab pertanyaan ini akan terkait dengan bagaimana panitia acara memilih lokasi dan menentukan siapa yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Mengingat kuota peserta dibatasi 150 orang jumlah peserta dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Informan ketujuh sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS menyatakan penentuan peserta atas bantuan DPD PKS di daerah pemilihan. Menurutnya kader di DPD PKS berperan juga sebagai panitia pelaksana Sosialisasi Empat Pilar yang menentukan lokasi kegiatan, pemilihan peserta dan saat hari pelaksanaan.

“Kegiatan Empat Pilar dilakukan di tempat-tempat PKS yang enggak punya DPR RI. Koordinasi dengan DPD setiap turun. DPD menjadwalkan mana (daerah) yang belum atau ada prioritas. Peserta yang ikut 60 persen dari masyarakat umum sisanya partisipan partai. Peserta diberikan undangan berupa kupon yang diberikan nomor urut sehingga kehadirannya bisa dikontrol.” (wawancara dengan SA pada Februari 2020)

Berbeda dengan informan ketujuh, informan keenam sebagai tim kerja informan kedelapan mengatakan pihaknya diberikan kewenangan untuk menentukan lokasi dan peserta yang akan diundang dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Partai Politik, baik DPD maupun DPC tidak ikut berperan secara kelembagaan namun secara individu banyak kader PAN yang dilibatkan sebagai panitia. Sebagai tim inti, informan keenam melibatkan tim di daerah yang akan dikunjungi untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Namun kontrol kegiatan ada di tim kerja utama yang merupakan kepanjangan langsung dari anggota dewan.

“Yang menentukan tempat saya sendiri, ada juga tim Primus ada tim kerja. Kegiatan disesuaikan dengan dengan kunjungan reses bisa berbarengan reses atau tidak. Lokasi kegiatan yang ditentukan berdasarkan lokasi yang belum hpernah terjangkau kegiatan sosialisasi. Sebagian besar lokasi yang dipilih adalah lumbung suara anggota.” (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Lebih lanjut informan keenam menjelaskan kegiatan Empat Pilar MPR RI dilaksanakan empat sampai lima kali dalam setahun. Dalam satu periode jabatan lebih dari 20 kali kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sebagian besar peserta kegiatan adalah konstituen atau para pemilih Anggota DPR RI bersangkutan di pemilu legislatif. Setiap kegiatan jumlah peserta dibatasi hingga 150 orang dengan minimal usia SMA sampai usia lanjut. Jika melebihi kuota, selama jumlahnya bisa ditoleransi, panitia akan menanggung pembiayaan tambahan.

Selama ini, sambung informan keenam, pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan yang berarti. Kesulitannya hanya dari pelaksanaan kegiatan yang sering tidak tepat waktu. Pasalnya, banyak peserta hadir terlambat sehingga jadwal acara pun mundur dari waktu yang ditentukan.

Mendukung pernyataan informan keenam, informan kedelapan mengatakan pemilihan peserta Empat Pilar diserahkan kepada tim pendamping dan hanya beberapa kali merekomendasikan wilayah untuk dikunjungi. Tim kerja sudah memahami alur tata kerja sesuai dengan keinginannya. Namun sebagai perwakilan dari partai, informan kedelapan mengaku harus bersiasat agar tidak berkegiatan di wilayah anggota dewan lain. Untuk itu, lokasi kegiatan umumnya dilakukan di wilayah yang menyumbangkan perolehan suara tinggi.

“Tidak, dari puluhan yang pernah kita lakukan itu paling ada saya kenal saya meneruskan kepada tim kami untuk Empat Pilar berikutnya di daerah tertentu. Untuk teknis tidak pernah ikut campur diserahkan pada tim. Dan yang harus diketahui tim ini siapa, tidak sembarang tim, mereka bertanggung jawab terhadap konstituen, punya tanggung jawab masing-masing. Sama saya juga punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab saya di ujung memberikan materi, foto-foto, dan membuat konstituen senang. Sebelumnya pemilihan tempat dan posisi yang memilah orang-orang ini. Jauh sebelum itu jangan diulang orang yang pernah hadir. Tidak apa-apa besok istrinya atau anaknya karena jangan diulang namanya mubazir. Kalau ada ilmu yang bisa didapat, disiapkan, didakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Mendakwahkan isi konten yang dibicarakan.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Soal perataan program ini, informan kedelapan meragukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar bisa sampai ke pelosok daerah sebab sampai saat ini belum ada database penyebaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di MPR. Untuk itu, sudah seharusnya MPR RI membuat database titik-titik mana yang sudah dijangkau program Sosialisasi Empat Pilar dan mana yang belum agar pelaksanaan program bisa merata di semua wilayah di Indonesia.

“Dari sejumlah 575 anggota DPR RI plus 132 anggota DPD wajib melaporkan laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang seharusnya dijadikan database untuk mengetahui penyebaran sampai dimana jangan sampai disitu lagi disitu lagi. Jadi tahu apakah ini ada program Empat Pilar. Yang mengadakan juga tidak hanya anggota dewan ada Pemda, ormas juga, tugas yang benar-benar ke pelosok. Kalau tidak tahu pasti tumpang tindih.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Soal tumpang tindih kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, ada temuan menarik dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur. Dimana dua orang anggota DPR RI pernah melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di tempat yang sama, yaitu: pertama, di SMA Nurul Falah Desa Cibadung dilakukan Sosialisasi Empat Pilar oleh Primus Yustisio, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN 24 April 2018, dan TB Soenmandjaja, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS pada 8 Desember 2017. Kegiatan tersebut menggunakan fasilitas sekolah, bedanya kegiatan Primus Yustisio dilakukan di siang hari dan di luar ruangan. Hampir seluruh peserta yang terlibat adalah siswa, sedangkan saat kegiatan TB Soenmandjaja, melibatkan sedikit siswa karena dilakukan pada malam hari, sebagian besar peserta adalah warga sekitar.

Kegiatan pun dilakukan di dalam ruangan karena kondisi cuaca tidak memungkinkan melakukan kegiatan di luar ruangan. Kedua, di Desa Rawakalong tapi berbeda tempat kegiatan. Primus Yustisio melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar pada 4 Mei 2015 di Madrasah Aliyah Al Inayah, dan pada 28 April 2019, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Bachtiar Ali melakukan kegiatan di Balai Desa Rawakalong. Dua lokasi kegiatan tersebut ternyata jaraknya cukup dekat. Meskipun kegiatan dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, namun dapat disimpulkan besar kemungkinan terjadi tumpang tindih kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, di beberapa wilayah.

Setelah ditelusuri, tim anggota dewan bersangkutan mengaku tidak tahu menahu jika di daerah tersebut sudah pernah ada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar oleh anggota dewan lain. Lalu bagaimana para peserta bisa mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar? Beberapa informan yang berstatus siswa atau yang bekerja di institusi pendidikan memiliki pendapat sama, bahwa mereka diwajibkan harus mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar karena aturan dari sekolah.

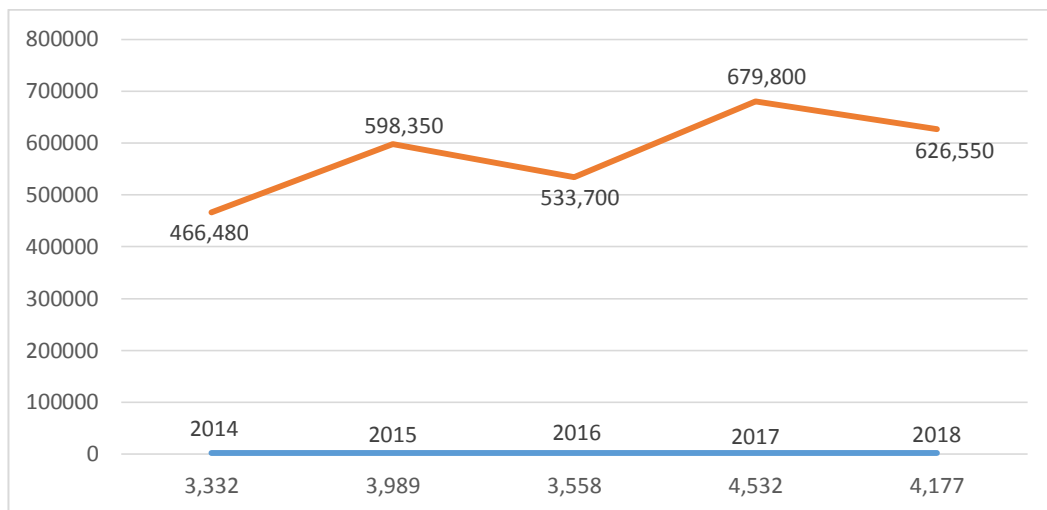
“Karena kegiatannya bekerjasama dengan sekolah, kegiatan itu tidak melibatkan masyarakat umum. Di sekolah kegiatan ini diselenggarakan untuk anak kelas 3, OSIS (Organisasi Sekolah Intra Siswa), dan guru-guru. Tapi bukankah para guru itu juga sebetulnya bagian dari masyarakat, yang nantinya mereka juga akan berinteraksi dengan para tetangganya. Pun kami sebagai siswa.” (wawancara dengan H pada Januari 2020)

Informan kedua mengatakan keterlibatan dirinya sebagai peserta karena dia tinggal di asrama sebagai wali kamar bagi para santri. Otomatis mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di pesantren termasuk saat diadakannya Sosialisasi Empat Pilar. Hal sama juga diungkapkan informan keempat, sebagai siswa dia diwajibkan mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di sekolah. Meskipun begitu, secara pribadi dia mengaku ingin tahu lebih banyak tentang kegiatan Sosialisasi Empat Pilar.

Dari beberapa informasi yang dihimpun dari narasumber juga diketahui pemilihan lokasi sosialisasi karena adanya unsur kedekatan antara institusi dengan anggota dewan atau tim sukses. Misalnya informan ketiga menduga, diadakannya Sosialisasi Empat Pilar di institusi pendidikan tempatnya bekerja karena ada hubungan baik antara kepala desa Rawa Kalong dan Anggota Dewan yang bersangkutan. Pernyataan serupa juga dikatakan oleh informan kelima. Menurutnya sekolah menjadi tempat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI karena ada beberapa guru yang kenal dengan tim anggota dewan bersangkutan. Namun, sekolah secara institusi tidak terlibat sebagai panitia.

“Tidak, panitia dari luar sekolah. Kami hanya fasilitator. sekolah juga tidak terlibat sebagai tim kepanitiaan tapi sebatas panitia dari kegiatan itu, meminjam ruang untuk dijadikan tempat sosialisasi bersama warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah, pesertanya lebih banyak berasal dari warga masyarakat.” (wawancara dengan DH pada Januari 2020)

Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Anggota DPR terus menerus melakukan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihannya masing-masing. Berikut sajian grafik jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dari tahun 2014-2018:



Grafik

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan

Tahun 2014 mengadakan 3,332 kegiatan dengan keterlibatan peserta 499.800 orang, tahun 2015 mengadakan 3.989 kegiatan dengan keterlibatan peserta 598.350 orang, tahun 2016 mengadakan 3,558 kegiatan yang melibatkan 553.700 peserta, tahun 2017 mengadakan 4.532 kegiatan yang melibatkan 679.800 orang, pada tahun 2018 mengadakan 4.177 kegiatan yang melibatkan 626.550 peserta.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Empat Pilar di Kampung Pakis Desa Rawakalong mayoritas adalah ibu rumah tangga karena kegiatan dilakukan di pagi hari sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Pada waktu tersebut, umumnya para kepala rumah tangga sedang bekerja. Menurut tim kerja, peserta yang hadir saat itu juga baru pertama kalinya diundang. Sebelumnya, Primus juga pernah melakukan kegiatan serupa di Pesantren Al Inayah Rawakalong, namun saat itu peserta kegiatan adalah para siswa.

4.3.5 Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437)

Responsivitas menunjukkan apakah program tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejauh mana masyarakat merespon kehadiran program Sosialisasi Empat Pilar. Berdasarkan wawancara, motivasi para peserta kegiatan rata-rata karena untuk memenuhi undangan atau sudah diwajibkan oleh sekolah. Namun tak sedikit juga yang termotivasi dari dalam diri sendiri untuk mengetahui kegiatan tersebut.

Narasumber menjadi salah satu daya tarik bagi para peserta. Seperti dikatakan informan kedua mengatakan ketika mengetahui narasumber Primus Yustisio membuatnya lebih antusias masyarakat untuk datang. Dimana dia tidak hanya melihat Primus sebagai wakil rakyat yang dipilih tapi juga seorang publik figur atau artis. Informan ketiga memperkuat argumen tersebut. Dimana kegiatan sosialisasi yang diadakan tim Primus Yustisio antusiasmenya lebih tinggi karena dia sosok artis. Walaupun antusiasme peserta dari jajaran RT dan RW tidak dapat diukur karena mereka hadir sebagai undangan.

“Namanya ditugaskan mungkin yang punya waktu ikut yang tidak punya waktu yang tidak datang, namanya juga undangan. Beda dengan Primus yang mengadakan, antara undangan dan sosok artis. Saat Primus lebih antusias karena salah satu daya Tarik masyarakat yang memilih Primus, seperti menemui anggota dewan.” (wawancara dengan HW pada Januari 2020)

Informan keenam membenarkan hal tersebut. Keberadaan Primus Yustisio kerap dinantikan oleh konstituennya.

“Kalau untuk kegiatan di sekolah, biasanya pihak sekolah yang mewajibkan siswa untuk hadir. Kalau untuk peserta dari masyarakat kami meminta tim yang ada di dapil membantu mencari peserta. Mungkin termotivasi karena salah satunya ada Pak Primus sebagai narasumber. Biasanya, masyarakat suka antusias kalau Pak Primus datang ke wilayah mereka. (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Bagi informan kelima, kehadiran anggota MPR sebagai narasumber seolah menjawab kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka.

“Anggota MPR sebagai narasumber menjawab kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka. Masyarakat senang dengan anggota dewan yang dekat dengan masyarakat karena bisa langsung menyampaikan aspirasi, bertanya langsung tentang apa yang ingin mereka sampaikan, dan harapan dari wakilnya (wawancara dengan DH pada Januari 2020)

Pendapat ini diperkuat oleh informan ketujuh selaku Anggota DPR RI yang mengatakan Sosialisasi Empat Pilar bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi.

“Sosialisasi Empat Pilar ini jadi kesempatan oleh konstituen untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi. Walaupun masyarakat banyak mengajukan pertanyaan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Anggota tidak dapat membatasi pertanyaan yang bisa diajukan. Hanya memberi pengertian mengenai batasan kewenangan antara DPR dan pemerintah.” (wawancara dengan SA pada Februari 2020)

Berbeda dengan informan ketujuh, informan kedelapan sebagai publik figur mengaku sering mendapat pertanyaan seputar kehidupan pribadi.

“Sama dengan nasib para selebritis atau artis yang jadi anggota dewan, mereka (masyarakat) tidak pernah melihat kompetensi lain selain sisi keartisan. Pada saat kampanye mereka tidak pernah bertanya DPR bahkan program-program di luar Empat Pilar kurang minat apalagi situasi politik disuguhkan berita politik ada. Nasib saya kalau berbicara kurang perhatian banyak yang nanya tentang istri anak. Ini yang berbeda.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Soal responsifitas apakah menjawab kebutuhan masyarakat, informan kesembilan mengatakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar mendapatkan respon baik dari masyarakat tiap tahunnya.

“Masyarakat merespon dengan baik. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diawali dari Amien Rais yang mulai mengamandemen UUD 1945 belum ada Empat Pilar. Sudah bertahun-tahun dilakukan dari mulai 2009-2015 pada masa Bapak Taufiq Kemas, tahun 2015-2019 Pak Zulkifli. Pada tahun 2004-2009 saat Pak Hidayat sudah mulai massif tapi namanya bukan Sosialisasi Empat Pilar. (wawancara dengan U pada Februari 2020)

Pengamatan di Kampung Pakis Desa Rawakalong dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Anggota DPR RI Fraksi PAN Primus Yustisio respon warga sangat antusias. Masyarakat sempat riuh mengabadikan kedatangan Primus ke kampung mereka apalagi saat itu ditemani oleh istrinya yang juga berprofesi sebagai artis. Alasan membawa istrinya karena menurut tim kerja Primus sempat berjanji untuk datang kembali ketika sudah terpilih. Artinya kedatangan informan kedelapan dan istrinya untuk memenuhi janji mereka semasa kampanye tahun 2014.

4.3.6 Ketepatan

William N. Dunn menyatakan bahwa ketepatan (Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu ada penilaian pada suatu program kebijakan agar memastikan bahwa apa yang ada dalam program tersebut sudah tepat untuk kebutuhan masyarakat. Apakah program ini sudah tepat atau layak di masyarakat? Sejauh mana manfaat yang didapatkan?

Informan pertama mengatakan dia mendapatkan manfaat dari program ini hingga bisa mengetahui pola kerja MPR DPR. Sebab narasumber tidak hanya memberikan penjelasan tentang Empat Pilar Kebangsaan tapi juga tentang tugas dan wewenang DPR dan MPR.

“Ada manfaat. Jadi tahu pola kerja MPR DPR. Karena selain empat pilar juga menjelaskan tentang itu.” (wawancara dengan H pada Januari 2020)

Soal ada tidaknya perubahan perilaku atau pola pikir setelah mengikuti kegiatan tersebut, informan pertama mengatakan perubahan hanya sedikit, tapi jadi lebih peduli sesama teman.

Mendukung pernyataan informan pertama, informan keempat juga mengaku menjadi tahu bagaimana kinerja anggota dewan saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar. Dia juga menyampaikan materi yang didapatkannya kepada orang lain.

“Saya sampaikan ke yang lain. Ada yang dimengerti dilaksanakan. Pak Primus menyampaikan hal sederhana tentang melaksanakan ibadah tanpa mengganggu ibadah agama lain. Shalat lima waktu seperti yang nabi ajarkan merupakan bagian pilar kebangsaan.” (wawancara dengan L pada Februari 2020)

Berbeda dengan informan pertama dan keempat, informan kedua mengatakan dampak dari kegiatan sosialisasi tidak terlalu terasa. Hanya merasa disadarkan kembali akan Empat Pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Manfaat ya jadi mengingatkan tentang Empat Pilar Kebangsaan, dasar-dasar negara.” (wawancara dengan HW pada Januari 2020)

Mendukung pernyataan informan kedua, informan ketiga mengatakan tidak merasakan dampak yang signifikan setelah mengikuti Program Sosialisasi Empat Pilar. Pun dengan perilaku dan pola pikir tidak ada hal yang signifikan.

“Kalau untuk masyarakat saya tidak tahu pasti apakah ada manfaat untuk mereka karena memang biasa-biasa saja. Kalau untuk pribadi ya sedikit banyak belajar lagi tentang apa saja yang ada di Empat Pilar. (wawancara

dengan HW pada Januari 2020)

Informan keenam menilai Program Sosialisasi Empat Pilar sudah tepat. Tapi pihaknya tidak mengukur sampai tingkat dampak.

“Program ini sudah tepat, Tapi kami tidak melihat sampai ke situ (dampak) Hanya saja ada yang diingatkan kembali dengan Empat Pilar yang sudah lama mereka tidak dengar. Minimal ada rasa nasionalisme yang dibangkitkan. Walaupun saat di lapangan banyak sekali ditemukan para peserta yang tidak tahu sama sekali apa itu Empat Pilar. Sehingga, ini menjadi tugas khusus bagi tim pemateri agar apa yang dia sampaikan bisa diterima oleh seluruh peserta dalam tempo yang sangat terbatas. Hal yang paling sederhana misalnya, ketika panitia atau pemateri memberikan kuis untuk menyebutkan butir-butir Pancasila, ada peserta yang lupa, terbalik memposisikan terhadap sila-sila dalam pancasila. Berbeda ketika kegiatan ini dilaksanakan di lembaga Pendidikan, pemateri lebih mudah menyampaikan paparan materinya terhadap para peserta yang berasal dari guru maupun siswa.” (wawancara dengan S pada Februari 2020)

Informan ketujuh mengatakan secara materi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar program yang sudah tepat sebagai upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, ada dua indikator berhasil atau tidaknya materi yang disampaikan yaitu narasumber dan waktu.

“Secara materi seharusnya kegiatan ini sudah tepat disampaikan pada masyarakat sebagai upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, Tinggal siapa penyampainya karena subjektivitas penyampai memengaruhi materi yang mestinya disampaikan secara utuh. Kedua, soal waktu, dengan durasi hanya dua atau tiga jam dengan materi sebanyak itu, dan tidak ada evaluasi apakah bisa tersampaikan semua materi.” (wawancara dengan SA pada Februari 2020).

Lebih lanjut informan ketujuh berpendapat program Sosialisasi Empat Pilar berdampak sangat baik pada masyarakat dalam upaya pemahaman kontitusi negara. Dampaknya tidak hanya untuk peserta tapi untuk anggota dewan itu sendiri.

“Ada tujuan secara khusus. Yang harus dipastikan manfaat buat peserta, apa sebetulnya manfaat. Saya buat quosioner kecil-kecilan, biasanya mereka ada diantaranya yang korektif, berani bicara. Menulis di Facebook dan berani berpendapat. Datang ke camat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap negara. Bagi saya sendiri manfaatnya *transfer of knowledge*, secara *knowledge up grade*. Jadi untuk mengubah mental, *to change mental attitude*, mulai dari diri kamu mengajak yang lain. Sedangkan untuk MPR sebagai kelembagaan tidak ada manfaat.

Perubahan ini manfaat MPR bagaimana kewenangan DPR ditambah saja. Sejarah, kewenangan tertinggi, inisiator tidak muncul dari MPR.” (wawancara dengan SA pada Februari 2020).

Informan kedelapan belum melihat ada dampak signifikan dari Program Sosialisasi Empat Pilar Hal ini terlihat dari kehidupan demokrasi masyarakat yang belum matang contohnya masih maraknya *money politic*.

”Tidak tahu, yang jelas bisa kita lihat *money politic* terjadi. Kalau dia tahu Empat Pilar tidak akan terjadi. Betapa pentingnya partai politik pentingnya pemilihan kepala daerah. *Money politic* kurang kesadaran demokrasi mandeg. Empat Pilar salah satu instrument membuat orang sadar berdemokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kalau masih *money politic* yang memberi maupun menerima menghinakan nilai-nilai demokrasi terutama menghancurkan Empat Pilar itu sendiri.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Namun soal perlu atau tidaknya Program Sosialisasi Empat Pilar, informan kedelapan mengatakan program ini tetap penting.

“Sangat penting, kalau makan pilihannya enggak ada garam atau enggak ada sambal enggak sedap ditambah lagi dessert walaupun tanpa ini bisa makan. Itu analoginya.” (wawancara dengan PY pada Juli 2020)

Terkait dengan nilai-nilai Empat Pilar, pengamatan penulis saat informan kedelapan menyampaikan materi Empat Pilar pada konstituennya di Kampung Pakis Desa Rawakalong, informan menyampaikan materi seperti tausiyah agama, dimana dia menghubungkan setiap materi kerukunan umat beragama dengan kewajiban menjalankan syariah dalam agama Islam. Salah satu pernyataan yang disampaikan yaitu bahwa kerukunan umat beragama itu selaras dengan ketaatan pada ajaran agama. Jika seseorang itu rukun dalam kehidupan beragama di masyarakat maka sudah dipastikan dia juga menjalankan syariat Islam dengan baik.

Informan kesembilan sebagai perwakilan dari MPR RI mengatakan program Sosialisasi Empat Pilar sangat baik.

“Kalaupun masyarakat tidak paham minimal mengetahui Empat Pilar MPR RI.” (wawancara dengan U pada Februari 2020)

Dampak Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan terhadap pola pikir maupun sikap toleransi memang tidak tampak secara angka. Namun menurut survey yang dilakukan oleh MPR mengenai ada tidaknya perubahan pandangan dan sikap setelah mereka mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, ditemukan 61,1% mengaku mereka mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan.

Selain itu, 90% responden mengatakan persetujuannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat final. Oleh karena itu wajar bila kemudian 99,5% menganggap setiap warga negara wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan wajib mengamalkan nilai-nilainya (98,9%). Selaras dengan pandangan ini 91,2% responden menganggap sampai saat ini nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan oleh warga negara setidaknya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara